

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang terus berupaya melaksanakan pembangunan. Ada berbagai cara untuk melakukan ini, tetapi semuanya berkisar pada tujuan yang sama: meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka. Sebagai sarana untuk mencapai tujuan nasional, pemerintah, bangsa, dan pemimpin bangsa telah menerapkan strategi pertumbuhan dan perubahan untuk membawa masyarakat kontemporer ke depan (SP Siagian : 2012).

Pembangunan dapat dilaksanakan jika tersedia dana yang cukup. Retribusi adalah sumber uang yang dapat digunakan untuk membantu pertumbuhan daerah tertentu. Retribusi bagi suatu daerah dibagi menjadi tiga golongan, sebagaimana diatur dalam UU No. 28 Tahun 2009, yaitu Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu. Retribusi parkir berada di bawah payung "retribusi jasa umum". Retribusi jasa umum adalah pembayaran yang dilakukan kepada Pemerintah Daerah untuk kepentingan masyarakat umum dan dapat dinikmati oleh orang pribadi atau sekumpulan orang. Retribusi parkir adalah suatu bentuk imbalan atas penggunaan suatu jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Restribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai bentuk pembayaran atas jasa atau izin khusus yang diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan

individu atau negara (Yoyo, 2017: 108). Sumber penerimaan daerah yang dapat dimanfaatkan sebagai salah satu potensi adalah retribusi parkir. Tingkat pendapatan asli daerah dapat diketahui melalui tolak ukur tersebut. Pembangunan Kota yang bersangkutan dapat dilakukan menggunakan hasil dari pendapatan tersebut. Sebagai salah satu kota, Malang merupakan satu dari beberapa kota yang berpotensi menyediakan dana untuk pembangunan. Hal ini terlihat dari Kota Malang yang dikelilingi oleh masyarakat dari berbagai kalangan, mulai dari perantau hingga setempat.

Semakin banyaknya masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan masyarakat khususnya di Kota Malang, maka semakin banyak pula masyarakat yang menggunakan kendaraan bermotor. Hal ini juga dapat meningkatkan jumlah retribusi yang diterima daerah jika ditangani dengan benar. Pemerintah Kota Malang melalui Dinas Perhubungan Kota Malang terus berupaya menaikkan pendapatan retribusi parkir dengan berbagai cara.

**Tabel 1. 1 Realisasi Pendapatan Asli Daerah Retribusi
Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum**

NO	BULAN	TARGET / REALISASI		
		2018	2019	2020
		<i>7,352,000,000</i>	<i>9,352,000,000</i>	<i>3,996,121,429</i>
1	JANUARI	548,310,000	574,958,000	685,675,000
2	FEBRUARI	488,816,000	568,057,000	647,769,000
3	MARET	549,242,000	598,146,000	558,066,000
4	APRIL	600,927,000	657,176,000	196,903,000

5	MEI	514,090,000	674,165,000	130,745,000
6	JUNI	348,758,000	391,495,200	231,779,000
7	JULI	657,760,000	770,693,000	317,483,000
8	AGUSTUS	594,533,000	648,654,000	337,771,000
9	SEPTEMBER	561,451,000	663,930,000	408,630,000
10	OKTOBER	659,405,000	704,321,000	339,717,000
11	NOVEMBER	608,392,000	643,406,800	414,948,000
12	DESEMBER	723,292,000	697,355,000	409,824,500
		6,854,976,000	7,592,357,000	4,679,310,500

Sumber : (Dinas Perhubungan Kota Malang, 2021)

**Tabel 1. 2 Realisasi Pendapatan Asli Daerah Retribusi
Tempat Parkir Khusus**

NO	BULAN	TARGET / REALISASI		
		2018	2019	2020
		648,000,000	648,000,000	581,624,429
1	JANUARI	56,000,000	30,050,000	94,484,000
2	FEBRUARI	54,000,000	60,050,000	86,364,000
3	MARET	54,000,000	90,050,000	85,860,000
4	APRIL	52,000,000	23,950,000	25,333,000
5	MEI	56,010,000	76,650,000	27,137,000
6	JUNI	52,000,000	68,000,000	38,284,000
7	JULI	54,830,000	-	36,715,000
8	AGUSTUS	54,000,000	39,331,000	57,390,000

9	SEPTEMBER	43,500,000	89,612,000	54,080,000
10	OKTOBER	64,050,000	101,147,000	57,212,000
11	NOVEMBER	73,500,000	93,549,000	63,040,000
12	DESEMBER	45,000,000	99,324,000	64,005,000
		658,890,000	771,713,000	689,904,000

Sumber : (Dinas Perhubungan Kota Malang,2021)

Berdasarkan penelitian pendahuluan yang peneliti lakukan dengan Kepala Seksi Pelayanan dan Tata Kelola Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Malang pada tanggal 4 Oktober 2021, terdapat beberapa upaya untuk meningkatkan retribusi parkir di Kota Malang. Beberapa upaya yang telah dilakukan antara lain adalah:

1. Mengelola parkir dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi. diantaranya adalah:
 - a) Membangun fasilitas parkir dengan menerapkan sistem e-parkir.
 - b) Menjalankan aplikasi Sistem Perparkiran Malang (Sitokirma).
2. Melakukan kajian potensi titik parkir.
3. Melakukan pembinaan terhadap petugas parkir
4. Melaksanakan operasi gabungan dengan jajaran samping secara rutin untuk menertibkan parkir liar.

Beberapa upaya di atas dilakukan karena banyak hambatan yang terjadi dalam upaya Dinas Perhubungan Kota Malang dalam meningkatkan retribusi parkir. Beberapa diantaranya adalah:

1. Terjadinya kebocoran dalam pemungutan retribusi parkir sehingga pendapatan retribusi parkir yang diterima tidak optimal.
2. Minimnya pengetahuan juru parkir terhadap aturan yang diberlakukan dalam pengelolaan tempat parkir.
3. Banyaknya parkir liar yang sulit dikendalikan.
4. Terjadinya pandemic *covid-19* yang menyebabkan berkurangnya mobilitas masyarakat sehingga berpengaruh pada pendapatan retribusi parkir.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya yang dilakukan Dinas Perhubungan Kota Malang dalam meningkatkan retribusi parkir di Kota Malang?
2. Apa faktor pendukung dan faktor penghambat Dinas Perhubungan Kota Malang dalam upaya meningkatkan retribusi parkir di Kota Malang?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan upaya Dinas Perhubungan Kota Malang dalam meningkatkan retribusi parkir di Kota Malang.
2. Untuk mendeskripsikan faktor pendukung dan faktor penghambat Dinas Perhubungan Kota Malang dalam upaya meningkatkan retribusi parkir di Kota Malang.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Secara teori, penelitian ini diharapkan memberikan wawasan dan pedoman bagi peneliti dan peningkatan ilmu mengenai teori administrasi publik terkait upaya Dinas Perhubungan untuk meningkatkan retribusi parkir di Kota Malang.
2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan saran kepada Kepala Dinas Perhubungan tentang tugas dan fungsinya untuk peningkatan retribusi

parkir di Kota Malang, serta saran terhadap faktor pendorong dan penghambat retribusi parkir di Kota Malang.